

IKK Outcome Dinas Lingkungan Hidup

No.	Urusan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Lingkungan Hidup	1) Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kabupaten	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan IKLH = 18,17+34,08 +14,04 = 66,29	Dinas Lingkungan Hidup
		2) Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	128.932/216.694 x 100 = 59.50 $\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
		3) Ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	21/30 x 100 = 70% $\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup

IKK Output Dinas Lingkungan Hidup

No.	Urusan Pemerintahan	Outcome	IKK Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Lingkungan Hidup	1	Hasil perhitungan terhadap : 1.a Indeks kualitas air (IKA) , indks kualitas udara (IKU) 1.b Indeks tutupan hutan (ITH)	1.a 18,17 1.b 34,08	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Urusan Pemerintahan	Outcome	IKK Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
			1.c Indeks kualitas tutupan lahan (IKLH)	1.c 14,04	
		2	1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di kabupaten	1) Rasio angkutan sampah terhadap volume timbulan sampah adalah = 0.44 2) 1 unit TPA lokasi desa Pegongsoran berjenis control landfill kapasitas 84.860 m3 dan open dumping kapasitas 928.000 m3 volume keterisian <i>overload</i> 3) Pemalang belum punya TPST	Dinas Lingkungan Hidup
		3	1) Data izin PPLH dan PUU LH yg diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	14/14 x 100 = 100 $\frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}}{\text{jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
			2) Rasio pejabat pengawas LH didaerah (PPLHD) di kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemkab	2/14 x 100% = 14,28 $\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
			3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten	$\frac{\text{Jmlh MHA yg diakui}}{\text{jmlh usulan MHA}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Urusan Pemerintahan	Outcome	IKK Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
			4) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan}}{\text{jmlh MHA yg ada}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
			5) Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemkab, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten yang ditangani	15/15 x 100% = 100 $\frac{\text{Pengaduan masyarakat yg ditangani}}{\text{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
			6) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	306 rumah	Dinas Lingkungan Hidup
			7) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	306 rumah	Dinas Lingkungan Hidup
			8) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	---	DPUTR